

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah melakukan pembangunan di bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salahsatunya adalah dengan cara membimbing masyarakat untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan agar menciptakan lapangan kerja yang baru pula. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah sebab perlu adanya dana yang besar dan bukanlah suatu masalah yang mudah. Oleh karena itu, muncul industri-industri jasa yang melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi diantaranya jasa perbankan atau keuangan.

Bank merupakan salahsatu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi yang membutuhkan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan dalam mengembangkan usaha dalam bentuk pemberian kredit. Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa lain *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain bahwa kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang dipercaya akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti kredit juga melibatkan reputasi seseorang berlandaskan kepercayaan dimana hal yang memungkinkan apabila seseorang bisa

memperoleh uang melalui perjanjian dengan membayar hal tersebut dimasa yang akan datang seperti apa yang dikemukakan Firdaus&Arianti(MacLeod,2017: 2 )berpendapat bahwa:

*“Credit is the personal reputation a person has, in a consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”*(kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang)

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan memang kredit itu bersifat *intangible* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan menjalankan perdagangan, mendorong dan menjalankan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia. Penyaluran kredit oleh bank juga perlu diketahui yaitu merupakan pilar perekonomian negara.

Dalam kegiatan operasional bank, kredit merupakan salahsatu kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh bank yaitu berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam penyaluran kredit ini sumber pendanaan utama sepenuhnya berasal dari DPK bank sehingga dalam penyaluran kredit kepada masyarakat wajib memperhatikan hal hal antara lain: memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*),memiliki keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup melunasi hutangnya, wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank. Hal ini dimaksudkan agar proses penyaluran kredit dapat disalurkan dengan optimal.

Berdasarkan pernyataan tersebut hal itu harus menjadi pertimbangan dan tolok ukur bahwa penyaluran kredit dalam pelaksanaannya memerlukan mekanisme sesuai *Standar Operasional Procedur*(SOP) pembiayaan dengan memperhatikan kebijakan serta asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat karena bagi bank hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank maka dalam proses realisasi kredit nantinya diharapkan debitur dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Perlu diketahui juga bahwa pendapatan terbesar suatu bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri sehingga dalam hal ini besarnya kredit yang disalurkan nantinya akan menentukan keuntungan bank. Maka dari itu, dalam hal ini setiap bank pasti memiliki target dalam penyaluran kredit dan menjadi sebuah prestasi bagi bank jika mampu mencapai target yang telah direncanakan serta mampu untuk hal tersebut dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Sehingga dalam hal ini setiap bank dan/atau salahsatunya BNI, pasti selalu berusaha memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan mutu serta fasilitas kreditnya.

Bank BNI merupakan bank usaha milik negara yang dalam kegiatan usahanya terutama dalam penyaluran kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dalam ekspansi kredit akan tetapi juga menjalankan fungsinya sebagai *agentofdevelopment*. BNI menjadi salahsatu lembaga yang memenuhi syarat merealisasi KUR yakni intermediasi penyalur KUR bagi calon debitur. Pada tahun 2022 ini PT. BNI menetapkan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.38 Triliun meningkat 22,7 persen dari alokasi tahun lalu dengan keyakinan bahwa untuk penyaluran KUR akan sesuai alokasi pemerintah. BNI

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan salahsatu fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia yang dikhususkan untuk dapat disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif baik kredit modal kerja atau investasi sesuai kebutuhan modal kerja/usahanya. Maka BNI KUR menjadi salahsatu pilihan yang tepat bagi pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Dalam penyaluran kredit tersebut diperlukan serangkaian proses yang harus diikuti oleh debitur ,selain dalam hal untuk proses kepentingan dalam realisasi kredit tetapi juga bisa disebut sebagai implementasi *prudentprincipal* bank dalam pemberian kredit sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kemungkinan tidak tertagih. Karena, pada kenyataannya penyaluran kredit selalu dihadapkan dengan risiko kredit macet. Dalam hal ini, jaminan menjadi salahsatu jalan untuk menempuh cara yang tidak merugikan bank dan termasuk kedalam aspek prinsip kehati-hatian bank. karena apabila debitur wanprestasi, maka yang akan melindungi bank dari risiko kerugian adalah jaminan tersebut. Walaupun program KUR ini diberikan dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya implementasi program KUR tersebut setiap bank pelaksana khususnya BNI mengharuskan adanya agunan tambahan senilai 20-30% dari nilai kredit apalagi jika *palfond* kredit diatas 100 juta maka jaminan tersebut berlaku dengan ketentuan *secured dan marketable* juga dapat mengcover kredit yang dibiayai. Hal tersebut dikenakan sebagai tanggungjawab moral bagi debitur KUR untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Dengan cara ini, bank juga berpotensi memotivasi debitur KUR

untuk menggunakan kreditnya secara baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan usaha.

Dari beragam jenis kredit yang ditawarkan oleh bank sesuai kebutuhan nasabah termasuk salahsatunya kredit KUR ini baik jenis modal kerja atau investasi, jenis kredit yang diberikan bank untuk membiayai usaha adalah jenis kredit modal kerja. Yang ditekankan pada skema jenis kredit yang disarankan adalah tujuan nasabah dalam pengambilan kredit dan/atau objek yang akan dibiayai. Jenis kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang paling banyak disalurkan dalam kredit usaha rakyat yaitu untuk membiayai kegiatan usaha yang dijalankan. Penyaluran kredit yang dilakukan tersebut oleh bank harus tetap dilakukan pengawasan meskipun pada dasarnya setiap kemacetan yang sesuai SOP akan di *cover* oleh lembaga penjamin kredit.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti diantaranya, menurut Agus Eko Nugroho (2016) menyebutkan adanya kontradiksi antara pemenuhan target dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR serta kemungkinan masalah *moral hazard* dalam program KUR yang terjadi pada beberapa bank penyalur benar adanya. Realitas dilapangan menunjukkan hal itu berimplikasi pada bagaimana kinerja penyaluran KUR oleh setiap bank pelaksana . maka dari itu,Prosedur pemberian kredit dibank harus benar dan semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisirdengan cara menilai kelayakan calon debitur tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, serta memproses dalam sistem dan prosedur yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, penulis bermaksud ingin membahas lebih lanjut dalam laporan tugas akhir yang berjudul **“MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT JENIS MODAL KERJA PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIAMIS”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas maka identifikasimasalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa persyaratan pembiayaan BNI Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
2. Bagaimana mekanisme penyaluran kredit Usaha Rakyat jenis Modal Kerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
3. Hambatan-hambatanapasadalam penyaluran BNI KUR pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
4. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam penyaluran BNI KUR pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Persyaratan pembiayaan BNI Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

2. Mekanisme penyaluran kredit Usaha Rakyat jenis Modal Kerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
3. Hambatan dalam penyaluran BNI KUR pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
4. Solusi mengatasi hambatan dalam penyaluran BNI KUR pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam proses penyaluran kredit dimana segala aspek yang dibahas dalam mekanisme penyaluran kredit ini dapat diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit dan menjadi solusi terhadap segala hambatan dalam pelaksanaannya untuk meminimalisir resiko kemungkinan tidak tertagih setelah dilakukannya proses realisasi kredit. Selain itu diharapkan menjadi bahasan yang memberikan suatu informasi mengenai bagaimana proses pemberian kredit KUR di BNI baik dalam hal persyaratan maupun prosedurnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti yakni dapat menambah pengetahuan mengenai mekanisme penyaluran kredit atau proses realisasi kredit mulai dari pengusulan kredit, analisa kredit serta kelayakan debitur, persetujuan kredit sampai proses pencairan hingga pengawasan kredit

setelah dilakukan realisasi kredit. Selain itu, peneliti dapat mengetahui bagaimana profesionalisme dan integritas pejabat kredit dalam mereflesikan peran yang dijabarkan dalam bentuk pemberian keputusan/kebijakan kredit dan proses pemberian kredit secara nyata dengan perbandingan yang didapatkan dari teori diperkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai objek penelitian dapat menggunakan laporan ini guna mengevaluasi peningkatan integritas serta efektivitas penyaluran kredit dengan mengkaji lebih lanjut penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kesesuaian peraturan dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk terus meningkatkan usaha bank dalam menyalurkan kredit melampaui target yang telah direncanakan setiap tahunnya dan perbaikan terhadap hambatan dan resiko yang ditemukan.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka penulisan dan penyusunan laporan ini, penulis melaksanakan penelitian yang dilaksanakan di Bank BNI KCP Ciamis. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis



terletak di Jln. Jenderal Soedirman No. 47 RT. 01 RW. 01 Kecamatan  
Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 Website: [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

## 2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis selanjutnya dilakukan pengolahan  
data hasil penelitian dengan matriks waktu penelitian sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Matriks Waktu Penelitian**

NO	KEGIATAN	MARET				APRIL				MEI				JUNI				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																	
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																	
3	Proses bimbingan Tugas Akhir (bab I - III)																	
4	Pengumpulan data penelitian : wawancara																	
5	Revisi Tugas Akhir (bab I-V) dan persetujuan revisi																	
6	Ujian Tugas Akhir																	
7	Revisi pasca ujian tugas akhir dan pengesahan revisi tugas akhir																	

Sumber : Data diolah, 2022